

Pengaruh Geostrategi Iran Terhadap Keamanan dan Ekonomi Dunia

Dirgo D.Purbo & Budi Pramono



Pendahuluan

Iran berada pada posisi geografis yang sangat strategis dalam peta dunia di sisi utara Teluk Persia dan punya cadangan minyak serta berhadapan langsung dengan Selat Hormuz. Dalam posisi cadangan minyaknya ini, Iran merupakan bagian dari kawasan yang kaya akan sumber daya alam seperti Saudi Arabia, Kuwait, Irak, dan Uni

Emirat Arab, yang masuk dalam kawasan *Heartland*. Berdasarkan data dari perusahaan minyak BP 2005 diindikasikan bahwa Iran menempatkan salah satu ladang minyak dan gas terbesar kedua di dunia, dengan potensi cadangan sekitar 132,5 miliar barel. Posisi pertama adalah Arab Saudi dengan perkiraan kandungan minyak 260 miliar barel, sedangkan Irak berada di posisi ketiga dengan perkiraan sekitar 115 miliar barel.

Proved oil reserves (million barrels, end of 2004) and
oil production (million barrels a day, 2004)

Country	Reserves		Production	
	MB	%	thousand bd	%
Saudi Arabia	262,700	22.1	10,584	13.1
Iran	132,500	11.1	4,081	5.2
Iraq	115,000	9.7	2,027	2.6
Kuwait	99,000	8.3	2,424	3.1
UAE	97,800	8.2	2,667	3.3
Rest of Middle East	27,000	2.0	2,788	3.5
Entire Middle East	733,900	61.7	24,571	30.7
Russia	72,300	6.1	9,285	11.6
Kazakhstan	39,600	3.3	1,295	1.6
China	17,100	1.4	3,490	4.5
USA	29,400	2.5	7,241	8.5
World	1,188,600	100.0	80,260	100.0

Source: Beyond Petroleum (2005)

Diperkirakan total cadangan minyak di kawasan *Heartland* memiliki lebih dari 60% cadangan minyak dunia. Sementara itu Selat Hormuz, terusan yang sangat sempit di mana setiap hari dilintasi tanker-tanker yang mengangkut minyak sekitar 18

juta barel per hari (bph) atau mewakili 40 persen ekspor minyak dunia. Penduduk Iran mayoritas terdiri dari bangsa Persia beragama Islam Sh'iah yang diperkirakan telah mencapai 60 juta orang. Kelompok pengikut Shiah ini mendominasi di berbagai negara

penghasil minyak seperti Bahrain, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, UAE dan sebagian kecil di Arab Saudi. Dalam berbagai kajian lembaga-lembaga Strategis negara barat diasumsikan bahwa kelompok Shiah ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam upaya mempersatukan/membentuk kekuatan negara-negara penghasil minyak.

Country	OPEC	Population millions	Shia %	Shia millions
Afghanistan		33	19	6.3
Azerbaijan		8	90	7.2
Bahrain		0.7	81	0.4
Iran		66	90	59.4
Irak	✓	28	80	16.8
Kuwait	✓	2.6	35	0.9
Lebanon		4	40	1.6
Oman		3.4	2	0.1
Qatar	✓	0.8	20	0.2
Saudi Arabia		28	10	2.8
Syria		20	25	5
UAE	✓	1.6	18	0.7
Yemen		23	15	3.5
Total		222.1		104.9

Gulf States (Population of Shia, Wikipedia, 2009)

Dari distribusi penyebaran agama Islam aliran Shi'ah di teluk Persia memperlihatkan adanya korelasi dengan potensi cadangan minyak. Bagi negara barat, khususnya konsumen minyak, keberadaan fakta ini membuat tafsiran tersendiri atas ajaran agama Islam. Traumatis yang pernah dihadapi mereka ialah pada waktu embargo minyak pada tahun 1973. Yang sangat dikhawatirkan apabila Iran dengan mudahnya dapat mengajak negara Islam lainnya untuk menggunakan minyak sebagai *bargaining power* dalam menjalankan

kebijakan luar negerinya. Iran dengan kekayaan migasnya, berpotensi untuk membangun kekuatan secara ekonomi dan militer dengan negara-negara tetangganya, bahkan dengan negara Islam lainnya seperti Lebanon dengan Shiah Hezbollah, Syria, Irak dengan sebagian penduduknya di sebelah selatan juga ikut ajaran Shiah, Palestina dengan Hamas serta Mesir.

Selain itu Iran memiliki cadangan gas alam yang sangat besar. Pada saat ini gas alam dan minyak disalurkan ke negara-negara *emerging countries* seperti China, India dan Indonesia, tidak lepas juga ke Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan sehingga menempatkan Iran sebagai sangat strategis dalam konstelasi percaturan geopolitik energi dunia. Tampak jelas sekali bahwa Iran mempunyai posisi *bargaining* geopolitik sangat tinggi terhadap percaturan keamanan internasional dan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu sangat tergantung pada jaminan suplai minyak dan gas dari negara produsen. Micahel T Klare, dalam ulasannya (*Blood and Oil, 2003*), melihat konteks Iran, bukan hanya terkait dengan jumlah atau besaran kandungan minyaknya, akan tetapi terutama kemampuan

kapasitas produksinya di masa depan. Sementara itu bila dibandingkan dengan Arab Saudi kini banyak kalangan menilai kapasitas produksinya sudah pada tingkat menurun. Saat ini Arab Saudi mempunyai kapasitas sekitar 11 juta bph. Ada perkiraan dari berbagai sumber konsultan perminyakan dunia bahwa Arab Saudi akan meningkatkan produksi sampai 20 tahun mendatang guna memenuhi permintaan China dan India. Permintaan tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 50 persen. Masih dari sumber yang sama *Oil and Gas Journal*, (2005), Iran diperkirakan memiliki 940 triliun kubik gas, atau mencapai 16 persen dari total gas alam dunia. (Rusia, sebagai penyuplai terbesar mempunyai cadangan sebesar 1.680 triliun kubik ton,). Sesuai dengan asumsi bahwa 6.000 kaki kubik gas sama dengan energi 1 barel minyak, maka kandungan gas Iran ekuivalen dengan 155 miliar barel minyak. Ini berarti bahwa kandungan hidrokarbon Iran ekuivalen dengan 280 miliar barel minyak, ini berarti kekuatan minyak dan gas Iran tak berbeda jauh dari Arab Saudi.

Dewasa ini, Iran memproduksi hanya sedikit dari cadangan gas mereka, sekitar 2,7 triliun kaki kubik per

tahun. Ini menandakan Iran mempunyai strategi dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya, dan berniat menjadi salah satu di antara pemasok gas terbesar di masa mendatang. Sementara itu permintaan dunia akan gas alam bertumbuh pesat bila dibandingkan dengan sumber energi lain, termasuk minyak. Iran yang juga sebagai anggota OPEC, menurut data yang dikeluarkan oleh IEA, 2006 memberikan indikasi kapasitas produksinya mendekati 4 juta bph. Produsen minyak negara-negara OPEC kawasan Timur Tengah mempunyai kontribusi 45 % dari peredaran minyak di dunia sehingga menempatkannya sebagai suatu kekuatan yang sangat vital, *Oil Weapon*. Kekuatan inilah yang diperlihatkan pada waktu perang Yon Kippur 1973 dengan mengembargo minyak ke negara konsumen dan kemudian pada tahun 1979 digunakan kembali *oil weapon* terhadap Amerika Serikat

Geopolitik dan Geostrategi.

Dalam mengulas konteks suatu negara dengan kondisi geografis, dapat dilakukan pendekatan melalui *Strategic Intelligence* berdasarkan uraian buku *Strategic Intelligence for Ameri-*

can World Policy oleh Sherman Kent (1966) dan *Strategic Intelligence Production, Washington Platt (1957)* elemen-elemen utama yang patut mendapatkan prioritas dimasukkan ke dalam agenda kepentingan nasional suatu Negara, antara lain: 1. Geografi, 2. Demografi. 3. Kultural, 4. Transportasi, 5. Ekonomi. 6. Geografi Militer. 7. Politik. 8. Komunikasi. 9. Sumber daya manusia.

Berangkat dari kriteria di atas, ketika negara dihadapi oleh kebutuhan yang sangat mendasar bagi rakyatnya yang tidak mungkin diperoleh dari kondisi geografisnya seperti minyak mentah, tentu upaya penjajakan ke negara lain yang memiliki kebutuhan dasar tersebut perlu dilakukan. Dalam hal ini tentu upaya pendekatan dilakukan melalui diplomasi. Minyak sebagai salah satu kebutuhan manusia, vital dan strategis tidak selalu tersedia depositnya di setiap negara. Jika deposit minyak itu ada, namun belum tentu menjamin kebutuhannya untuk kemudian hari. Atas dasar tidak adanya keseimbangan kebutuhan pokok yang terdapat pada kondisi geografis negara maka kemudian berkembanglah teori geopolitik yang mempunyai berbagai tafsiran.

Aspek minyak selalu mempunyai dimensi geopolitik, geostrategi dan geoekonomi sejak awal abad 19. Minyak mentah telah menjadi komoditi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka peralatan militer dan mesin perang dikembangkan dengan menggunakan bahan bakar. Yang menjadi persoalan bagi negara-negara di benua Eropa Barat ialah keterbatasan cadangan minyaknya. Oleh karena itu hampir semua negara tersebut melakukan pencarian sumber energi, terutama di kawasan *Heartland*. Seiring dengan itu, perlu terlebih dahulu memahami awal dari teori geopolitik dan geostrategi dengan pertimbangan bahwa letak geografis Iran berada di kawasan *Heartland*.

Pemikiran geopolitik sampai akhir abad ke-19 didominasi oleh teori Ratzel, R Kijlen dan Mackinder dengan teori *Heartland*, yang menganggap negara sebagai organisme serta pengaruh alam terhadap perilaku kehidupan manusia atau *geographical determinist*. Pada awal abad ke-20 muncul pemikiran geopolitik dari para ahli Perancis seperti Albert Demangeon, Louis Febure, Andre Siegfried dan Jacques Ancel, dan tidak

lepas juga dari Amerika seperti Henry Kissinger, Brezinzky, Kagan. Dapat dirangkum bahwa para pemikir strategis itu beranggapan bahwa teori geopolitik dianggap sudah tidak relevan dan kemudian memperkenalkan teori *Geostrategi*. Makna dari *Geostrategi* yakni merupakan strategi yang dirumuskan atas dasar pemahaman atas kondisi geopolitik untuk kepentingan nasional. Tentu dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama untuk mencapai tujuan politik suatu bangsa. *Geostrategi* merupakan seni dan ilmu yang digunakan dalam membina, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan oleh suatu negara yang biasanya direncanakan untuk menjangkau masa depan.

Semenjak awal abad 19 akses ke sumber energi, khususnya minyak, menjadi ajang pertarungan bagi negara-negara di belahan Eropa Barat, terutama sejak Inggris mulai melakukan konversi bahan bakar dari batubara ke minyak untuk seluruh kekuatan militernya, khususnya kapal perang. Bagi Inggris menguasai sumber-sumber minyak sudah merupakan panggilan kepentingan nasional mengingat kekuatannya berpedoman

pada *supremacy at sea*. Keputusan strategis ini untuk mengimbangi persaingan dengan kekuatan militer di Eropa Barat, antara lain Jerman. Setelah perjuangan *First Sea Lord of The British Royal Navy*, J. A. Fisher, yang mencetuskan agar seluruh kapal perang Inggris menggunakan bahan bakar minyak dari batubara, timbul persoalan baru, bagi Inggris, karena tidak punya cukup deposit minyak dari negaranya sendiri, sementara di kawasan Eropa Timur, seperti di Rumania sudah bergejolak dengan negara lain yang juga memerlukan minyak. Admiral Fisher mengalami hambatan dari politik di dalam negeri untuk mencetuskan gagasannya. Pada tahun 1911 muncul peristiwa *gunboat* di mana kapal Jerman memasuki kawasan perairan Maroko yang sudah dikuasai oleh Perancis tetapi Winston Churchill beranggapan gerakan agresif Jerman tersebut merupakan ancaman langsung terhadap Inggris. Berpangkal dari titik ini, Winston Churchill langsung mendukung upaya Admiral Fischer dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan bahan bakar minyak (a) biaya operasi akan jauh lebih murah, (b) kecepatan kapal berbanding tiga kali lebih cepat, dan (c) dalam pembakaran mesin kapal tidak menghasil-

kan asap sehingga tidak dapat terdeteksi jarak jauh. Faktor-faktor inilah yang menjadikan minyak mempunyai *comparative advantage* dan *competitive advantage*. Pada tahun 1912 sampai 1914, Winston Churchill langsung mencanangkan *Major Naval Program*, di mana titik beratnya adalah penggantian seluruh mesin kapal perang bahan bakar batubara ke minyak dan sekaligus mengamankan jalur suplainya dari kawasan Persia. Kekuatan militer Inggris pada tahun 1915 memiliki 205 pesawat tempur, kemudian menjadi 5500, kekuatan darat 23 000 kendaraan roda empat, ditambah sepeda motor 34 000 dan truk sebanyak 56 000 unit. Secara keseluruhan kendaraan bermotor membutuhkan bensin dan solar yang perlu terjamin. Dari sini-lah timbulnya ketergantungan atas suplai minyak dari beberapa negara seperti : Rumania, Rusia, California-USA, Trinidad, Hindia Belanda (Indonesia), kawasan Mesopotonia dan Persia.

Memasuki tahun 1917, kekuatan militer negara-negara Eropa Barat Perancis, Jerman, Inggris, Italia dan beberapa negara lainnya sudah sangat tergantung pada minyak, maka mengamankan jalur suplai dari sumbernya

sudah merupakan bagian dari prioritas pertahanan. Pertempuran di arena perairan dengan menenggelamkan kapal-kapal suplai minyak terjadi begitu sengit. Sebagai sekutu Amerika, PM Perancis, membuat pernyataan kepada Presiden Amerika Woodrow Wilson dengan mengatakan : “*If the Allies do not wish to lose the war, then, at the moment of the great German offensive, they must not let France lack of the petrol which is as necessary as blood in the battles of tomorrow.*”

Setelah usai perang dunia pertama, Perancis dan Inggris melakukan evaluasi secara menyeluruh dan membuat suatu kesimpulan bahwa peralihan dari batubara ke minyak akan membuat negara-negara berlomba untuk mendapatkan akses ke sumber cadangan minyak, dan 60% itu berada di kawasan *Heartland*. Salah satu Senator Inggris mengatakan “*all the world now desired control over this new source of energy and its associated supply chain*”.

Kompetisi untuk mendapatkan jalur suplai minyak antara Inggris dan Perancis mulai muncul ke permukaan diawali dari kota Mosul di sebelah utara Irak. Di kawasan kota ini

terdapat cadangan minyak sangat besar dan merupakan titik sentral untuk distribusi minyak melalui pipa ke benua Eropa. Nilai strategis kota ini lebih terlihat ketika minyak masuk dari sebelah timur, yakni Iran dan dari selatan Arab Saudi.

Pada prinsipnya Perancis dan Inggris melakukan perjanjian bersama untuk memperoleh jaminan produksi minyak dari kota ini, dan berikut penyalurannya yang melintas Syria menuju pelabuhan di laut Mediteranian. Perancis dan Inggris berupaya untuk menutup akses Amerika di kawasan ini karena adanya tindakan resipokal yang dilakukan terhadap kedua negara ini di kawasan Amerika Latin, terutama Meksiko. Upaya Inggris untuk membangun *sphere of influence* di Irak dan Iran diyakini atas hasil evaluasi dari perang dunia pertama dengan pandangan seperti yang disampaikan berikut ini: "*Oil was such a strategic military necessity that its procurement demanded government involvement and support*". Atas dasar pemahaman inilah maka penguasaan minyak di kedua negara, Irak dan Iran, merupakan agenda utama kepentingan nasional. Di bawah kepemimpinan Churchill, saham perusahaan minyak Anglo Persian

yang mempunyai cadangan minyak di Iran dikuasai sebesar 51%. Inggris menempatkan *grand strategy* atas Cadangan minyak di Iran bagian dari *military strategic for British Navy*. Langkah strategis Inggris ini, memicu Amerika untuk melakukan pendekatan secara khusus dengan pemerintah Iran.

Maka persaingan untuk mendapatkan konsesi minyak di Iran mulai bergejolak, terlebih Amerika mendapat halangan sangat kuat dari Inggris. Melihat kondisi ini, Amerika bergeser ke Arab Saudi, melakukan pendekatan dengan raja Ibnu Saud. Untuk jangka waktu relatif lama, Inggris telah menguasai cadangan minyak Iran yang dimulai sejak konsesi d'Arcy sampai lahirnya perusahaan minyak *British Petroleum* yang kini menjadi Beyond Petroleum, BP.

Namun menjelang perang dunia kedua, beberapa perusahaan minyak Amerika mulai menguasai Iran dan persaingan kedua negara semakin tajam. Kedua negara berpendapat bahwa menguasai cadangan minyak di Iran merupakan kekuatan militer dengan armada angkatan laut untuk mengamankan dunia.

A New Center of Gravity

Memasuki dekade 30-an, temuan-temuan ladang minyak di daerah Timur Tengah mulai menjamur, terutama diawali oleh seorang insinyur tambang dari Selandia Baru bernama Frank Holmes yang mulai meniti karirnya di Bahrain (diminta Raja) bukan untuk mencari minyak tetapi sumber air. Holmes berhasil menemukannya dan sebagai kompensasi Raja memberikan konsesi minyak Al-Hasa yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Setelah melakukan perjuangan dengan beberapa kali kegagalan hasil pengeboran akhirnya Holmes berhasil menemukan cadangan minyak. Tersebarlah berita ini ke lembaga keuangan di Amerika dan Inggris. Dengan penemuan tersebut, mulailah berdatangan ahli-ahli geologis untuk melakukan *survey* eksplorasi di Arab Saudi. Dua geologis Amerika yang sebelumnya bekerja di kawasan Amerika Latin, berhasil menemukan cadangan minyak yang sangat besar. Temuan ini menambah besar persaingan untuk mendapatkan konsesi minyak di Arab Saudi. Pada saat yang bersamaan Inggris juga menemukan ladang-ladang minyak baru di Iran. Melihat begitu besarnya temuan ladang minyak di kawa-

san Timur Tengah, kedua geologis ini membuat laporan ke kongres Amerika dan menyimpulkan bahwa perkiraan cadangan minyak Iran, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain dan Qatar mencapai 25 miliar barel dan 5 miliar barel sendiri berada di Arab Saudi. Bahkan potensi cadangan minyak di kawasan ini bisa mencapai 300 miliar barel. Atas dasar laporan inilah akhirnya mengubah konsentrasi kebijakan luar negeri negara-negara maju, untuk mendapatkan sumber minyak, yang sebelumnya dari kawasan Amerika Latin lalu bergeser ke kawasan Timur Tengah. Memasuki dekade 40-an disebutlah kawasan Timur Tengah sebagai *a new center of gravity for oil*. Persaingan untuk mendapatkan dan memproduksi minyak terjadi antara Iran dan Arab Saudi. Pada saat yang bersamaan Amerika telah memasuki era baru sebagai *net oil importer*, dan dengan status ini akan menambah gencarnya untuk menguasai ladang-ladang minyak di Arab Saudi dan Iran. Setelah wafatnya Reza Pahlevi pada tahun 1941 di Afrika selatan, ladang minyak berikut refinery di Abadan menjadi sasaran strategis sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus.

Inggris dan Rusia mempunyai kepentingan yang sangat besar atas akses ini. Melihat begitu strategisnya sumber minyak di Iran, sementara hasil penjualan minyaknya tidak memberikan begitu signifikan untuk kas negara, maka Majelis di pemerintahan Iran pada tanggal 28 April 1951 memutuskan untuk mengangkat Mohammed Mossaddegh sebagai Perdana Menteri dengan tugas utama melakukan nasionalisasi perusahaan minyak yang telah dikuasai oleh Inggris. Terbentuklah perusahaan minyak negara bernama "Iranian National Oil Company".

Mosaddegh mempunyai karismatik yang sangat kental berdasar patriotisme dan nasionalisme untuk memperjuangkan kepentingan nasional Iran, terutama dalam hal pengelolaan minyak. Bagi negara-negara maju keberadaan Mosaddegh sebagai halangan, terutama Amerika. Selagi Iran menghadapi kesulitan keuangan dan tidak mendapatkan bantuan yang besar dari Amerika dan Inggris, Mosaddegh mulai melirik ke Rusia, dan hubungan ekonomi semakin meningkat setelah ada penempatan duta besar yang baru. Hubungan yang baik ini membuat Amerika menuduh Mosaddegh mulai berpaling ke negara

komunis. Amerika terlibat atas politik minyak di kawasan Timur Tengah dan semakin meluas dengan adanya operasi intelijen AJAX di Iran untuk mengganti pimpinan. Jendral Norman Schwatzkopf Sr. lalu ke Teheran untuk menemui teman lama serta kawan terdekatnya Moh Reza Shah Pahlevi yang dikenalnya ketika mengikuti pendidikan, dalam rangka menggantikan Mossaddegh.

Setelah tahun 1953, Iran dipimpin oleh Reza Pahlevi dengan protektorat dari Amerika. Pada tahun 1979, Reza Pahlevi turun dari kepemimpinannya setelah dua puluh lima tahun berkuasa. Gerakan Revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini semakin memperuncing ketegangan hubungan dengan Amerika dan akibatnya Iran melakukan embargo minyak. Sejak tahun 1979 Iran memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika.

Runtuhnya dinasti Reza Pahlevi pada Januari 1979, merupakan bencana besar bagi kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah, karena tidak hanya faktor ekspor minyaknya yang sebesar 16% dari total impor Amerika, tetapi juga hilangnya pos keamanan jalur pelayaran di Selat

Hormuz. J.C. Hurewitz yang mengulas dalam buku *Foreign Policy Association*,⁷⁹ mengatakan bahwa Iran diklasifikasikan sebagai *Superstate* karena faktor-faktor penduduk, luas wilayah, produksi minyak, ladang gas, serta kekuatan militer. Selanjutnya Irak dan Arab Saudi dikategorikan sebagai *Major State*. Amerika beranggapan bahwa posisi Iran dan Arab Saudi merupakan *global power balance* dengan begitu selalu berupaya untuk mencegah pengaruh Uni Soviet (Rusia). Kebijakan politik dalam negeri Iran telah berubah dengan adanya pengaruh Rusia serta Cina mulai mewarnai Iran. Bagi Amerika hal ini tentu merupakan ancaman yang sangat serius, maka tidaklah mengherankan ketika Jimmy Carter mengatakan "*attempt by an outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States,*" and pledged to defend that interest by "*any means necessary, including military force.*"

Dengan telah hilangnya pengaruh Amerika di Iran, Amerika pada tahun 1980 Amerika langsung membentuk wilayah pertahanan baru dengan sebutan *US Central of Command* (US CENTCOM) yang bermarkas di

Florida. Keberadaan Centcom ini merupakan salah satu bagian dari wilayah pertahanan Amerika dalam skala global seperti USPACOM, USEUCOM, USNORTHCOM dan USSOUTHCOM.

Perkembangan Ekonomi Global

Ketatnya persaingan untuk mendapatkan akses ke sumber minyak di Timur Tengah semakin terasa ketika Cina mendeklarasikan negaranya memasuki status sebagai *net oil importer* tahun 1993. Cina menghadapi hambatan untuk bisa akses ke negara penghasil minyak di Timur Tengah, kecuali Iran. Di lain pihak Iran yang juga memerlukan peremajaan persenjataan militernya antara lain WMD, Missile, nuclear, anti tank, artillery, anti aircraft missile dan juga kapal perang, bersedia untuk dibarter dengan minyak dan gas alam. Peluang ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Cina.

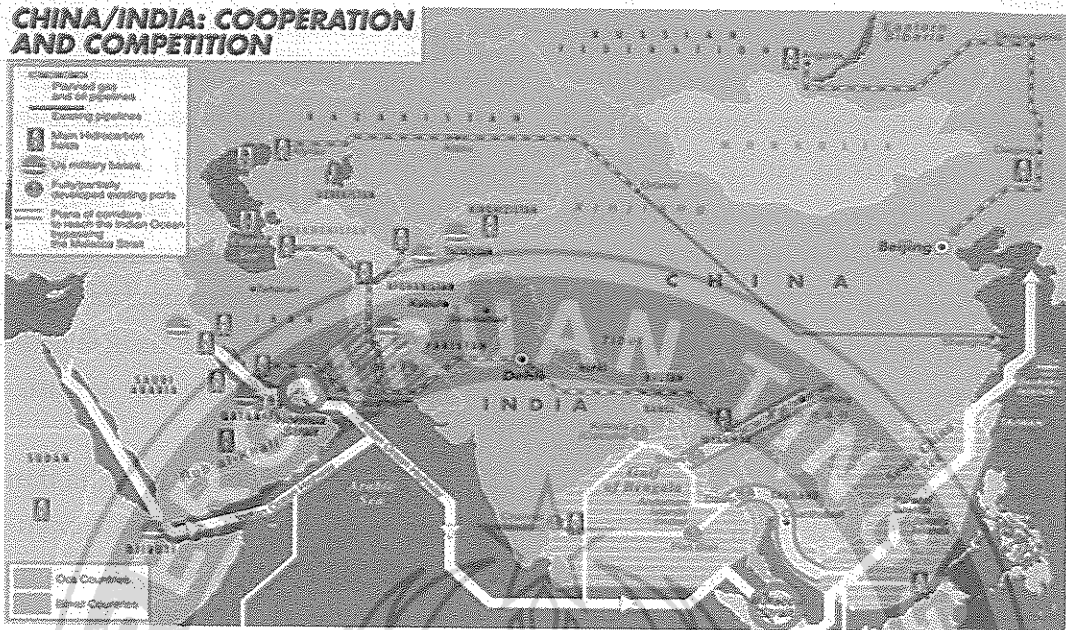
Selain itu lagi, adanya larangan perdagangan Amerika dengan Iran yang diperkuat dengan *Executive Order* (EO) 12959, yang ditanda tangani Presiden Clinton pada 1995 kemu-

dian diperbaharui oleh Presiden Bush pada bulan Maret 2004, membuat Cina semakin leluasa. Pemerintah AS akan memberikan sanksi bagi perusahaan asing yang melakukan bisnis di Iran (di bawah peraturan *Iran-Libya Sanction of 1996*), meskipun demikian sanksi ini tidak cukup kuat untuk menghalangi perusahaan untuk tetap mencari akses ke kandungan energi Iran. Cina, memerlukan jumlah sangat banyak minyak dan gas sebagai tambahan untuk menjalankan perekonomiannya. Menurut Departemen Energi (DoE), Iran telah menyediakan 14 persen dari total ekspor secara nasional ke Cina dan jumlahnya akan lebih besar di masa datang.

Cina juga mengharapkan bantuan Iran untuk impor LNG (*liquid natural gas*). Pada bulan Oktober 2004, Iran menandatangani 100 miliar dolar AS, untuk kontrak 25 tahun dengan Sinopec, perusahaan minyak terbesar Cina, guna melakukan kerja sama pembangunan ladang gas terbesar dan yang akan diantar ke Cina. Jika kesepakatan ini didukung penuh, maka ini akan mengukuhkan Cina sebagai investor luar negeri terbesar dan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara.

Pesat pertumbuhan ekonomi global diikuti juga oleh India yang sangat mengharapkan minyak dan gas dari Iran. Pada bulan Januari 2005 lalu, Otoritas Gas India (*Gas Authority of India Ltd, GAIL*) menandatangani kerja sama dengan *National Iranian Gas Export Corp* untuk transfer 7,5 juta ton LNG ke India per tahun.

Dalam konteks ini, pejabat India dan Pakistan baru-baru ini sudah mendiskusikan upaya membangun saluran gas alam dari Iran ke India via Pakistan senilai 3 miliar dolar AS. Meskipun kedua negara bermusuhan akibat konflik Kashmir, namun karena aspek energi telah menjadi agenda kepentingan nasional maka rasa permusuhan itu dapat dihilangkan untuk sementara waktu. Masalah energi sudah merupakan masalah kelangsungan hidup bernegara, (*Survival of the Nation*). Jaringan pipa akan dibangun untuk menghubungkan kedua negara, dan Pakistan akan menerima 200-500 juta dolar AS per tahun sebagai biaya tol transit. Menurut PM Pakistan Shaukat Aziz, pipa gas merupakan solusi win-win untuk Iran, India dan Pakistan.



Sumber : Slide - Supercourse Lecture Geopolitik Perminyakan, oleh Dirgo D. Purbo-SESKOAD-SESKAU, 2008

Sementara Jepang, sebagai *net oil importer* berupaya juga untuk mempertahankan hubungan kerjasama energi dengan Iran. Pada tahun 2003, sebuah konsorsium dari tiga perusahaan Jepang memperoleh 20 persen dari pembangunan ladang minyak lepas pantai Soroush-Nowruz di Teluk Persia, yang menghasilkan 1 miliar barel minyak. Setahun kemudian, *The Iranian Offshore Oil Company* memberikan kontrak senilai US\$ 1,26 miliar kontrak ke perusahaan minyak Jepang, Japan's JGC Corporation, untuk mengangkat gas alam dari Soroush-Nowruz dan beberapa ladang minyak lepas pantai lainnya.

Begitu strategisnya posisi Iran dalam penyediaan energi global membuat Amerika berupaya untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Pada zaman pemerintahan Bush pernah mempunyai dua strategi terhadap Iran : (1) memaksa ladang minyak dan gas Iran dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika, dan (2) mengalihkan perhatian ke Iran sebagai pesaing Amerika dalam pasar energi dunia. Di bawah kebijakan luar negeri AS, langkah pertama telah dilakukan setelah Presiden mengeluarkan EO 12959, namun ini tidak seperti yang diharapkan selama Iran dikontrol oleh para Mullah anti-Amerika. Demikian pula, tuduhan kepemilikan sen-

jata pemusnah massal, meskipun sampai saat ini sama sekali belum terbukti. Larangan Amerika Serikat terhadap produksi energi dan ekspor Iran menyebabkan Teheran tidak memiliki pilihan, kecuali untuk alasan memenuhi konsumsi dalam negeri mereka.

Indonesia yang statusnya sudah sebagai *net oil importer* sejak tahun 2004, dan telah keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008, melakukan hubungan khusus dengan Iran. Pada minggu kedua bulan Maret, 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Iran, di saat Iran tengah menghadapi ancaman sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan PBB karena rencana program nuklirnya, untuk menandatangani MOU dengan rencana mengimpor *crude oil* sebesar 300 ribu barel per hari. Impor minyak mentah tersebut untuk mendukung pembangunan kilang minyak di Banten. Di samping itu Indonesia telah melakukan investasi untuk membangun *petrochemical-plant*, pupuk senilai 470 juta euro di Kawasan energi Assaluyeh, Iran. Keputusan pemerintah Indonesia untuk membangun pabrik pupuk itu karena suplai gas alam dari dalam negeri sudah tidak lagi mencukupi dan adanya jaminan

suplai gas alam dengan harga yang sangat murah US\$1 /mmbtu. PLN juga berupaya sekuat tenaga untuk melakukan pendekatan dengan Iran agar bisa mendapatkan suplai gas alam.

Strategi Kebijakan Energi Iran

Ketika harga minyak mencapai US\$ 145 per barel pada tahun 2008, Iran dihadapkan pada kelangkaan bahan bakar. Hal ini terjadi karena pemerintah Iran memberikan subsidi yang sangat besar bagi rakyatnya. Harga BBM di Iran 60% di bawah harga minyak internasional. Tapi perlu dicatat bahwa pada kenyataannya Iran memiliki strategi untuk penggunaan energinya. Konsumsi minyak Iran hanya berkisar 2,5 juta barel per hari, sedangkan sisanya diekspor. Saat ini Iran berupaya untuk mencanangkan program penggunaan gas alam pada kendaraan umum. Dalam skala yang lebih besar, strategi kebijakan energi Iran untuk mengembangkan program nuklirnya tidak lepas dari upaya Iran untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyaknya yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Tujuan akhirnya tidak adalah untuk memperoleh devisa yang sebesar be-

sarnya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di sektor lain. Rencana pembangunan tenaga nuklir untuk tujuan damai telah diupayakan sejak era Moh Reza Pahlevi sebelum tahun 1979. dengan mengatakan tujuannya yakni : *“full-fledged nuclear power industry” with the capacity to produce 23,000 megawatts of electricity*. Dan berjanji akan membeli teknologinya dari Amerika dan negara barat lainnya. Kebijakan Amerika berubah setelah adanya gerakan revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Program pengembangan nuklir tersebut akhirnya dicurigai oleh Amerika dan negara sekutunya dengan menyatakan ada kemungkinan digunakan untuk kegiatan militer.

Sejak terputusnya hubungan diplomatik dengan Amerika, rencana pengembangan tenaga nuklir Iran untuk tujuan damai terus menerus mengalami hambatan. Semenjak tahun 1955 Amerika dan Uni Soviet (Rusia) telah berupaya untuk saling mengikat diri dalam konsep pengembangan dan penggunaan senjata nuklir. Namun setelah dua puluh enam tahun kemudian kedua negara saling membuka dan juga mentransfer ke beberapa negara (*proliferation*). Atas dasar pertimbangan tersebut PBB mem-

bentuk *International Agency of Atomic Energy (IAEA)* 1957 dengan maksud untuk mengutamakan pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai, dan sekaligus memonitor transfer teknologi, termasuk penggunaan untuk kegiatan militer.

Dalam perjalanannya pengembangan tenaga nuklir pada fase pertama terdapat empat negara yang melakukan uji coba yakni Inggris 1952, Perancis 1960, Cina 1964 dan India 1974. Selanjutnya negara lain mengikuti jejaknya seperti Pakistan, Korea Utara, Israel, Iran, Algeria, Libya dan Afrika Selatan. Melihat perjalanan sejarah perkembangan nuklir untuk tujuan damai negara lain, Iran merasakan adanya diskriminasi. Oleh karena itu Akbar Etemad, *the chairman of Iran's Atomic Energy Organization*, menyampaikan bahwa : *“Iran has full right to decide whether to reprocess or otherwise dispose or treat the materials provided under the agreement.. Iran will go ahead to reprocess and rejected “second-class” status foreshadowed Iran's present-day claims about nuclear “rights” under the NPT*

Penutup

Iran dengan kekayaan alamnya terutama minyak dan gas alam, serta adanya Selat Hormuz yang dilewati sekitar 18 juta barel minyak per hari merupakan *geopolitical leverage* bagi Iran. Ketergantungan beberapa negara atas ekspor minyak dan juga gas alamnya membuat Iran mempunyai sikap yang jelas dan tegas di forum internasional, dalam menghadapi tekanan-tekanan politik dari beberapa negara maju yang begitu gencar atas upayanya mengembangkan tenaga nuklir meskipun untuk tujuan damai. Iran yang sekarang dipimpin oleh Mahmoud Ahmaddineja tetap saja bersikeras untuk terus melanjutkan programnya.

Iran, mempunyai *grand strategy* dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Dengan adanya upaya isolasi dari negara-negara maju, Iran mendapatkan mitra strategis yakni Cina dan Rusia, termasuk beberapa negara lainnya untuk mendapatkan jaminan suplai energi. Iran juga membuka hubungan bilateral secara khusus dengan Venezuela. Persenjataan militer Iran banyak diperoleh dari Cina dengan dikompensasikan dengan jatah alokasi ekspor minyak dan gas alam. Indonesia yang menjalankan kebijakan luar negeri dengan pedoman bebas aktif, perlu melakukan lebih intens di bidang ekonomi. Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalin kerjasama di bidang energi perlu lebih dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama di kawasan *Heartland*, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi dalam negeri di masa mendatang. □

Daftar Pustaka

1. Data Statistic Production *Beyond Petroleum*, 2005 dan *Oil and Gas Journal*, 2005
2. Klare, Michael, *Blood and Oil*, published by Penguin Group, 2004
3. *Energi Information Administration* (EIA), OPEC Data, 2006
4. D. Purbo, Dirgo, *Geopolitik Perminyakan*, penerbit oleh CSICI 2006

5. Tertzakian, Peter, A Thousand Barrels A Second, published by Mac Graww Hill, USA, 2007
6. Forbes, R.J., Studies in Early Petroleum History, E.J.Brill, Netherlands, 1958
7. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power by Daniel Yergin; 1991, Simon & Schuster, New York.
8. Kleveman, Lutz, The New Great Game, Blood and Oil in Central Asia, Atlantic Monthly Press, 2003, America
9. Burr, William. 19 January 2009 "*The history of Iran's nuclear energy program*" Tambahan daftar buku referensi
10. Energy and National Security, Proceeding of Special Conference, Cosponsored by the office of under Secretary of Defence for policy and the national Security Institute, National Defence University, by Donald J. Goldstein, 1983.
11. The Economic of The Oil Crisis, by T.M. Rybcynsky, Trade Policy research Center London. 1975
12. US National Security, Policy Makers, Process and Politics, Sam C. Sarkesian, 1995
13. A Century of War,- Anglo Americana Oil Politics and the New World Order. F William Engdahl. 1992